

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tumbuh stabil di atas 5 % dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh sektor pertanian, manufaktur, dan jasa serta konsumsi domestik dengan kekayaan sumber daya alam seperti kelapa sawit, batu bara, dan minyak bumi yang mendukung ekspor (Hartarto, 2023). Meski demikian, kesenjangan infrastruktur, kemiskinan, ketimpangan sosial, serta tekanan dari pandemi dan perubahan iklim mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi inklusif demi memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat (WEF, 2020).

UMKM memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dimana mereka mampu beradaptasi, berinovasi, dan menggerakkan berbagai sektor seperti perdagangan, manufaktur, dan jasa (BCG, 2021). Selain itu, UMKM juga berkontribusi ekspor produk lokal dan memperkenalkan kreasi khas ke pasar global, menciptakan nilai tambah signifikan berkat dukungan akses pembiayaan, kemitraan strategis, dan digitalisasi (Grehenson, 2024). Menurut UU No. 20/2008, UMKM diklasifikasikan berdasarkan aset, omset, dan tenaga kerja, yakni mikro, kecil, dan menengah dengan batasan aset hingga Rp 10 miliar dan omzet hingga Rp 50 miliar per tahun (Tambunan, 2013)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan sebagai perusahaan produktif yang dimiliki atau dijalankan oleh individu atau badan usaha, diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih dan omzet tahunan. **Usaha Mikro** memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta (tidak termasuk tanah/bangunan) dan omzet tahunan paling banyak Rp 300 juta; **Usaha Kecil** berkisar dari aset Rp 50–500 juta dan omzet Rp 300 juta–2,5 miliar; sedangkan **Usaha Menengah** memiliki aset antara Rp 500 juta–10 miliar dan omzet Rp 2,5 miliar–50 miliar (Kementrian Kemendag dan Kemenkop UKM, 2008).

UMKM merupakan pilar utama ekonomi inklusif di Indonesia, menyumbang lebih dari 97% dari total usaha yang berhasil menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau setara 97% dari total angkatan kerja nasional terutama di daerah pedesaan dan kota kecil (KADIN, 2023). Mereka menyediakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, mendukung pemberdayaan lokal, membuka peluang kewirausahaan, serta membantu pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial (Masduki, 2023).

UMKM di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks akibat keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan kendala infrastruktur serta regulasi. Banyak pelaku kesulitan memperoleh pembiayaan formal karena minim jaminan, suku bunga tinggi, dan persyaratan ketat, sehingga sebagian besar bergantung pada pinjaman informal yang tidak memadai (CIPS, 2023). Selain itu, rendahnya keterampilan manajerial dan finansial serta masih digunakannya metode tradisional membuat perencanaan usaha dan perhitungan

HPP sering tidak tepat. Ketimpangan digital juga menjadi penghalang akses internet belum merata, literasi digital rendah, dan biaya investasi teknis yang tinggi membatasi pemanfaatan teknologi digital seperti e-commerce, fintech, atau QRIS. Regulasi dan perizinan yang rumit, serta persaingan dari produk impor dan perusahaan besar, juga menjadi hambatan serius bagi UMKM untuk memperluas pasar. Di daerah terpencil, infrastruktur fisik dan digital yang memadai masih langka, menyulitkan distribusi dan memperlambat pertumbuhan usaha mereka. Menurut beberapa penelitian, meningkatkan literasi keuangan dan digital serta mempermudah akses pembiayaan melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan UMKM di era ekonomi digital Indonesia (Kemenkop UKM, 2023)

Berikut ialah data pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia selama lima tahun terakhir:

Tabel 1.1
Data Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Tahun	Jumlah UMKM (juta unit)	Pertumbuhan (%)
2019	64,2	-
2020	64,2	0,0
2021	64,2	0,0
2022	65,0	1,2
2023	66,0	1,5

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, KADIN Indonesia

Selama periode 2019 sampai 2023, jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Pada tahun 2019 sampai 2021, jumlah UMKM stagnan di angka 64,2 juta unit,

kemungkinan dipengaruhi dari dampak pandemi COVID-19 yang menghambat pertumbuhan sektor usaha kecil. Namun, pada tahun 2022, jumlah UMKM naik jadi 65 juta unit, dengan pertumbuhan sebesar 1,2%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana jumlah UMKM mencapai 66 juta unit, tumbuh sebesar 1,5% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menyatakan pemulihan dan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor UMKM pasca pandemi. Meskipun demikian, tantangan seperti akses permodalan, digitalisasi, dan peningkatan daya saing masih perlu diatasi guna memastikan keberlanjutan dan kontribusi signifikan UMKM pada perekonomian nasional.

UMKM di Indonesia sering mengalami kendala dalam perhitungan biaya produksi karena berbagai faktor penting. Banyak usaha menjual produknya di bawah biaya produksi karena akses modal terbatas, minim pencatatan keuangan, dan kurangnya pengetahuan dalam menghitung harga pokok produksi (HPP) dan harga jual yang menjadi batang penyuplai utama kesalahan ini. Akibatnya, profitabilitas menurun dan usaha sulit bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, biaya produksi yang tinggi seperti bahan baku, listrik, transportasi, dan regulasi turut memperburuk daya saing harga, sementara literasi keuangan yang rendah membuat pelaku UMKM belum mampu memperbaiki sistem pencatatan dan manajemen keuangan (Masduki, 2022)

UMKM sering mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual yang ideal karena literasi keuangan yang rendah, sehingga banyak produk dijual di harga yang tidak kompetitif dan gagal mencapai margin laba optimal. Menurut ekonom Saparini (2021), hal ini menimbulkan stagnasi usaha karena UMKM

kesulitan menetapkan harga yang tepat. Oleh karena itu, pelatihan tentang penetapan harga dan manajemen keuntungan menjadi sangat penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM.

Kerajinan tenun ikat merupakan wujud UMKM kreatif yang kaya akan nilai estetika dan filosofi lokal, tercermin lewat motif-motif tradisional yang ditunen menggunakan alat tradisional seperti ATBM. Tekniknya melibatkan proses pengikatan dan pewarnaan benang sebelum ditunen menjadi kain, setiap motif menyimpan makna budaya dan status sosial tertentu, dan prosesnya memakan waktu serta keterampilan tinggi (Nurhayati, 2017). Tenun ikat ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas budaya masyarakat, tetapi juga mampu menjadi produk unggulan dengan nilai ekonomi tinggi yang dapat diperdagangkan di pasar domestik maupun global.

Tenun ikat Indonesia memiliki berbagai motif yang terus berevolusi, menggabungkan pola-pola tradisional seperti sarung kuno dengan elemen modern untuk memenuhi selera pasar kontemporer. Kini, tenun ikat semakin diakui melalui perlindungan kekayaan intelektual, seperti Indikasi Geografis (IG), yang membantu menjaga keaslian motif dan meningkatkan nilai tambah produk. Dampaknya nyata: kain tenun bukan hanya dihargai karena estetika dan filosofi budayanya, tetapi juga karena potensi ekonomi yang baik di pasar lokal maupun global yang menjadikannya aset penting dalam rantai ekonomi kreatif (Ramli, 2016).

Kerajinan tenun ikat di Desa Taekas, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan penjelasan di atas mengenai pentingnya tenun ikat sebagai warisan budaya dan komoditas bernilai ekonomi. Di Desa Taekas, masyarakat setempat masih mempraktikkan teknik tradisional pada pembuatan kain tenun ikat, yang diwariskan dengan turun-temurun dari leluhur mereka. Tenun ikat di daerah ini dikenal dengan motif khas yang menggambarkan identitas budaya dan sosial masyarakatnya, yang mencerminkan kearifan lokal serta nilai-nilai filosofi yang terkandung pada setiap helai kain yang dihasilkan.

Proses pembuatan tenun ikat di Desa Taekas menggunakan benang yang dipintal dari kapas lokal/benang pabrik, pewarna kain alami yang berasal dari tanaman yang terdapat di Desa Taekas (seperti kunyit, indigo, atau kayu noni), serta alat-alat tradisional, seperti alat tenun tangan (*tradisional loom*), yang membuat setiap kain mempunyai nilai seni dan keunikan tersendiri. Motif-motif yang dihasilkan tidak hanya mempunyai makna simbolis pada kehidupan sehari-hari, namun juga jadi representasi dari status sosial dan budaya masyarakat setempat secara turun-temurun. Hal ini menyatakan betapa pentingnya tenun ikat sebagai bagian dari identitas budaya Desa Taekas. Sejalan dengan itu, teknik yang digunakan dalam pembuatan tenun ikat di Desa Taekas hingga kini masih sangat kental dengan cara-cara tradisional. Dalam praktiknya, sebagian besar pengrajin tetap mempertahankan metode tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) yang dioperasikan secara manual. Setiap tahapan pengerjaan mulai dari pemintalan benang, pengikatan motif, pewarnaan dengan bahan alami, hingga proses penenunan yang dilakukan dengan penuh ketelitian, kesabaran, serta keterampilan khusus. Proses konvensional ini memang membutuhkan waktu produksi

yang lebih lama dibandingkan dengan teknik modern, namun justru menghadirkan keunikan pada setiap helai kain yang dihasilkan. Selain itu, metode ini dipandang penting oleh masyarakat setempat karena diyakini mampu menjaga keaslian motif, kualitas kain, sekaligus melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, kerajinan tenun ikat ini kini mulai mendapat pengakuan sebagai produk unggulan dengan nilai jual yang tinggi, tidak hanya di pasar lokal, namun juga di pasar internasional, berkat pengakuan sebagai kekayaan intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang potensial. Dengan demikian, tenun ikat di Desa Taekas tidak hanya jadi warisan budaya yang terus dilestarikan, namun juga merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi yang penting bagi masyarakat setempat.

Pengrajin tenun ikat membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus guna bisa menjalankan proses produksinya. Dari sebab itu, penentuan harga pokok penjualan harus dijalankan dengan tepat agar dapat memaksimalkan hasil penjualan (Mulyadi,2008). Namun dengan semakin berkembangnya zaman, tenun ikat Desa Taekas ini dihadapkan dengan persaingan yang sangat ketat. Sehingga pada realita kehidupan pemasaran mereka sulit guna memasarkan hasil kerajinan tenun ikat akibat sistem pemasaran yang kurang efektif, pencatatan dan perhitungan HPP yang masih menggunakan metode sederhana, dan terbatasnya motif kain. Kondisi ini jadi pengaruh terhadap penetapan harga jual yang tepat dan kompetitif serta menjadi penyebab pendapatan dari usaha tersebut tidak konsisten (Konda, 2021).

Penilaian komoditas produksi mempunyai relevansi yang signifikan pada konteks ini, sebab ketersediaan harga komoditas produksi dapat membantu pengrajin pada berbagai fungsi, seperti menentukan harga jual yang tepat dari produk mereka, menilai keuntungan dan kerugian yang terjadi, dan memfasilitasi pembentukan biaya fundamental yang terkait dengan inventaris produk dan barang jadi pada proses produksi (Wedanta & Marvilianti, 2021). Harga komoditas produksi merangkum pengeluaran agregat yang dikeluarkan selama durasi tertentu. pada praktik akuntansi konvensional, biaya produksi terdiri dari tiga komponen utama, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead yang terkait dengan pabrik (Mulyadi, 2018:36).

Pada saat melakukan observasi awal yang dijalankan peneliti kepada para pengrajin tenun ikat, ditemukan beberapa permasalahan substansial pada perhitungan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, serta strategi pemasaran. Para pengrajin mengakui bahwasanya pada menghitung harga pokok produksi setiap produknya mereka masih mengalami kendala. Selain itu, mereka juga kurang memahami perhitungan harga pokok penjualan, yang sering kali menyebabkan modal usaha berkurang sebab pendapatan dari penjualan kain tenun dengan hasil yang tidak sama digabungkan, meskipun masing-masing hasil mempunyai harga jual yang tidak sama. Selain itu, mereka juga belum optimal pada menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Situasi ini digambarkan lewat tabel 1.1 dibawah ini yang berisi daftar nama pengrajin tenun ikat di Desa Taekas dengan tingkat harga jual pada masing- masing produk kain tenun.

Tabel 1.2
Daftar Nama Pengrajin Tenun Ikat di Desa Taekas dengan Tingkat Harga
Jual masing-masing Produk Tenun

KETERANGAN	NAMA PENGRAJIN	HARGA
Sarung	Ibu Rini Siki	Rp 1.250.000,00
	Ibu Carolina	
	Ibu Albina	
Selendang	Ibu Ingmi	Rp 100.000,00
Selimut	Ibu Jana	Rp1.000.00,00
	Ibu Maria	
	Ibu Yohana	

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Tabel yang disajikan memberi gambaran yang jelas mengenai pengrajin tenun di Desa Taekas, terdapat tujuh pengrajin yang bereperan dalam proses pembuatan hasil tenunan yang unik, mulai dari selendang, selimut, sampai sarung. Data ini mencerminkan kekayaan budaya dan keterampilan lokal pada industri tenun, yang merupakan bagian penting dari warisan budaya masyarakat setempat.

Dari data yang ada, terlihat bahwasanya Ibu Rini Siki, Ibu Karolina dan Ibu Albina ialah pengrajin yang memproduksi sarung, dengan harga jual Rp 1.250.000,00. Sarung, sebagai salah satu produk tenun yang populer, menyatakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk lainnya. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu dan tingkat kesulitan dalam pembuatan serta kebiasaan yang sering dipakai pada berbagai acara dan ritual budaya. Selain itu, kualitas dan desain sarung yang dihasilkan dari Ibu Rini, Ibu Karolina dan Ibu Albina juga dapat berkontribusi pada harga jual yang lebih tinggi. Selanjutnya, Ibu Jana, Ibu Maria dan Ibu Yohana memproduksi selimut dengan harga jual Rp 1.000.000,00. Selimut merupakan produk yang juga mempunyai nilai guna

yang tinggi, terutama di daerah dengan iklim yang lebih dingin. Meskipun harga jual selimut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sarung, produk ini tetap menyatakan nilai yang signifikan. Hal ini menyatakan bahwasanya pengrajin tenun di Desa Taekas mampu menghasilkan produk yang tidak hanya estetis namun juga fungsional. Di sisi lain, Ibu Ingmi memproduksi selendang dengan harga jual yang lebih rendah, yakni Rp 100.000,00. Selendang sering kali dianggap sebagai aksesoris fashion yang lebih terjangkau, yang mungkin menjelaskan mengapa harga jualnya lebih rendah dibandingkan dengan sarung dan selimut. Meskipun demikian, selendang tetap mempunyai daya tarik tersendiri, terutama di kalangan konsumen yang mencari produk tenun yang lebih ringan dan mudah digunakan.

Dalam observasi lapangan yang dilakukan, ditemukan bahwasanya para pengrajin tenun ikat sering kali mengalami kesulitan pada menentukan harga pokok produksi (HPP) dan harga jual. Hal ini disebabkan dari metode perhitungan yang dipakai cenderung sederhana dan hanya mempertimbangkan biaya bahan baku serta tenaga kerja langsung. Mereka sering kali mengabaikan biaya tetap seperti penyusutan alat tenun, transportasi, listrik atau biaya overhead lainnya yang sebenarnya mempunyai kontribusi signifikan pada keseluruhan biaya produksi. Akibatnya, harga jual yang ditetapkan sering kali tidak mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan, sehingga mengurangi potensi keuntungan atau bahkan menyebabkan kerugian.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa masing-masing pengrajin memiliki jumlah modal awal yang berbeda dalam

menjalankan usaha tenun ikat. Perbedaan modal ini secara tidak langsung mempengaruhi kapasitas produksi, kemampuan membeli bahan baku dalam jumlah tertentu, serta fleksibilitas dalam menentukan harga jual. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penjualan dan laba yang diperoleh antar pengrajin menjadi tidak merata. Namun, apabila para pengrajin menggunakan dasar perhitungan biaya yang sama melalui penerapan metode *full costing*, maka meskipun modal awal berbeda, struktur biaya per unit produk dapat dihitung secara lebih objektif dan proporsional. Bahkan, dalam kondisi ideal dimana tujuh pengrajin memiliki modal yang sama dan menggunakan metode perhitungan yang seragam, maka harga pokok produksi dan margin laba dapat ditentukan secara setara berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan. Dengan demikian, potensi kesetaraan laba bukan ditentukan semata-mata oleh besar kecilnya modal, melainkan oleh ketepatan dalam menghitung seluruh komponen biaya produksi serta konsistensi dalam menetapkan margin keuntungan.

Oleh karena itu, penerapan metode *full costing* menjadi penting tidak hanya untuk memperoleh harga jual yang akurat, tetapi juga sebagai dasar dalam menciptakan sistem pembagian hasil yang lebih adil dan proporsional apabila para pengrajin bersepakat mengelola usaha secara kolektif dengan modal yang setara.

Secara konseptual, apabila ketujuh pengrajin memiliki jumlah modal awal yang sama dan menggunakan metode perhitungan biaya yang seragam berbasis *full costing*, maka struktur biaya produksi per unit akan relatif setara, dengan

asumsi kapasitas produksi, jenis produk, serta tingkat kerumitan motif yang dihasilkan berada pada tingkat yang sama. Dalam kondisi tersebut, harga pokok produksi (HPP) yang dihasilkan dari masing-masing pengrajin akan mencerminkan total biaya yang sebenarnya, sehingga penetapan harga jual dengan margin laba yang sama akan menghasilkan tingkat keuntungan yang relatif setara. Dengan demikian, kesetaraan laba bukan semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya modal, melainkan oleh keseragaman sistem perhitungan biaya, efisiensi produksi, dan konsistensi dalam penerapan margin keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa metode *full costing* dapat menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan akurasi penetapan harga, tetapi juga membuka peluang terciptanya sistem usaha bersama yang lebih adil dan transparan bagi seluruh pengrajin

Seharusnya, para pengrajin menerapkan metode *full costing* guna menghitung HPP dengan lebih akurat. Metode ini mencakup seluruh elemen biaya produksi, baik biaya tetap ataupun variabel, sehingga memberi hasil perhitungan yang lebih komprehensif. Dengan menerapkan metode *full costing*, pengrajin dapat mengetahui dengan jelas biaya total produksi per unit dan menetapkan harga jual yang realistis dan kompetitif. Namun, pada praktiknya, pendekatan ini belum diimplementasikan sebab keterbatasan pemahaman dan kurangnya pengetahuan akuntansi di kalangan pengrajin.

Berdasarkan data yang ada pada situasi ini, penting guna menerapkan metode *full costing* guna membantu pengrajin pada menentukan harga pokok penjualan (HPPJ) yang lebih akurat. Metode *full costing* mencakup seluruh

biaya yang terkait dengan produksi, termasuk biaya tetap dan variabel, sehingga memberi gambaran yang lebih jelas mengenai profitabilitas produk.

Asumsi ini diperkuat dari penelitian yang mengungkapkan bahwasanya penerapan metode *full costing* pada menghitung biaya produksi membantu pengrajin untuk memperhitungkan dengan menyeluruh seluruh komponen biaya, baik tetap ataupun variabel. Dengan demikian, pengrajin dapat menetapkan HPPJ yang lebih tepat, mengurangi risiko underpricing, dan meningkatkan profitabilitas. Penelitian terdahulu pada Jurnal Akuntansi Biaya (2020) juga mendukung hal ini, menyatakan bahwasanya pendekatan *full costing* menghasilkan perhitungan HPP yang lebih akurat dibandingkan dengan metode variabel costing yang hanya memasukkan biaya variabel.

Pertama, pengrajin perlu mengidentifikasi seluruh biaya yang terlibat pada proses produksi. Biaya ini dapat dibagi menjadi dua kategori: biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap mencakup sewa tempat, gaji pekerja rumahan, dan biaya penyusutan peralatan. Sementara itu, biaya variabel mencakup bahan baku, upah tenaga kerja langsung, biaya transportasi dan biaya operasional lainnya yang berubah sesuai dengan volume produksi. Dengan mengumpulkan data ini, pengrajin dapat menghitung total biaya yang dikeluarkan guna setiap jenis produk yang dihasilkan.

Selanjutnya, pengrajin juga perlu mempertimbangkan faktor pasar pada menentukan harga jual. Meskipun HPP memberi dasar yang kuat guna penetapan harga, pengrajin harus tetap memperhatikan harga yang ditawarkan dari pesaing dan permintaan pasar. Jika harga jual yang ditetapkan lebih tinggi

dari pesaing, pengrajin harus memastikan bahwasanya produk mereka mempunyai nilai tambah, seperti kualitas yang lebih baik atau desain yang unik. Dengan demikian, pengrajin dapat bersaing dengan efektif di pasar tanpa mengorbankan profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dijalankan dari Rahayu dan Setyawan (2021), yang menyatakan bahwasanya produk kerajinan yang menonjolkan kualitas bahan dan keunikan desain dapat menarik segmen pasar yang bersedia membayar lebih, meskipun harga jualnya lebih tinggi dari pesaing. Dengan demikian, pengrajin dapat bersaing dengan efektif di pasar tanpa mengorbankan profitabilitas.

Selain itu, penting bagi pengrajin guna melakukan penilaian rutin terhadap pengeluaran dan harga eceran mereka. Mengingat bahwasanya kondisi pasar dan biaya produksi dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu, pengrajin dipaksa guna merevisi metodologi penetapan harga mereka sesuai dengan itu. Mulyadi (2009:50) menegaskan bahwasanya biaya komprehensif mencakup keseluruhan biaya yang terkait dengan objek informasi. Jika objek informasi berkaitan dengan suatu produk, biaya komprehensif mewakili biaya agregat yang terkait dengan produk itu. Perhitungan biaya komprehensif guna suatu produk dibentuk dari metodologi yang dipakai pada menentukan biaya item produksi. Dengan memanfaatkan pendekatan penetapan biaya yang komprehensif, pengrajin diberikan proses yang efisien guna melakukan analisis biaya dan memastikan apakah modifikasi harga diperlukan guna mempertahankan profitabilitas. Pendekatan ini juga dapat memfasilitasi perencanaan yang lebih efektif guna upaya produksi di masa depan.

Secara keseluruhan, penerapan metode *full costing* pada analisis harga jual produk tenun di Desa Taekas dapat memberi manfaat yang signifikan bagi para pengrajin. Dengan memahami dan mengelola biaya produksi dengan efektif, pengrajin tidak hanya dapat meningkatkan profitabilitas, namun juga memperkuat posisi mereka di pasar. Ini adalah langkah penting guna melestarikan dan mengembangkan industri tenun yang kaya akan budaya dan tradisi di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis penentuan harga jual dengan metode full costing pada usaha tenun ikat Desa Taekas**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan kerangka kontekstual seputar masalah yang disebutkan di atas, artikulasi masalah pada ruang lingkup penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana penentuan harga pokok produksi dan harga jual pada usaha tenun ikat Desa Taekas?
- 2) Bagaimana bentuk penentuan harga pokok produksi dan harga jual jika berbasis metode *full costing* pada usaha tenun ikat Desa Taekas?
- 3) Bagaimana penetapan harga jual berdasarkan metode full costing dengan margin laba yang realistis untuk mendukung keberlanjutan usaha tenun ikat Desa Taekas?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan formulasi masalah yang diberikan, berikut ini menggambarkan tujuan penelitian:

- 1) Untuk mengetahui penerapan sistem penentuan harga pokok produksi dan penerapan sistem penentuan harga jual pada usaha tenun ikat di Desa Taekas.
- 2) Untuk menganalisis penentuan harga pokok produksi dan harga jual jika berbasis metode full costing pada usaha tenun ikat di Desa Taekas.
- 3) Untuk menganalisis penetapan harga jual berdasarkan metode full costing dengan margin laba yang sesuai bagi keberlanjutan usaha tenun ikat Desa Taekas

1.4 Manfaat Penelitian

Mengingat penjelasan yang telah diartikulasikan, hasil penyelidikan ini diantisipasi guna menghasilkan keuntungan dari perspektif teoritis dan pragmatis, dengan penggambaran manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pengrajin Tenun Ikat di Desa Taekas

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dari pengrajin tenun ikat guna menentukan harga pokok produksi hasil tenun ikat mereka, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat maksimal ketika produk dipasarkan.

2. Bagi Akademisi

Investigasi ilmiah ini diantisipasi guna meningkatkan pemahaman dan memberi para sarjana informasi tambahan mengenai materi pelajaran yang sedang diperiksa. Selanjutnya, temuan penyelidikan ini juga diproyeksikan guna berfungsi sebagai referensi atau sumber dasar literatur guna penelitian masa depan yang berkaitan dengan mekanisme penetapan harga barang

produksi melalui penerapan metodologi Penetapan Biaya Penuh pada konteks pengrajin tenun yang diikat.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan guna mengeksplorasi metode yang lebih komprehensif yang dapat meningkatkan pemahaman pengrajin mengenai manajemen fiskal dan strategi promosi, sehingga memungkinkan mereka guna meningkatkan daya saing mereka di pasar.